



BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Berdasarkan Permasalahan serta Isu strategis yang telah dikemukakan dalam Bab IV, dikaitkan dengan target-target solusi yang dirumuskan dalam tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diuraikan dalam Bab V, maka dirumuskan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun 2019-2024 dapat dijabarkan sebagai berikut.

Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah untuk mencapai sasaran. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Selain itu perumusan strategi juga memperhatikan masalah yang telah dirumuskan pada tahap perumusan masalah. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah

Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah perlu dirumuskan agar visi dan misi yang sudah diuraikan dalam tujuan dan sasaran dapat dicapai. Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/ perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Strategi dan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Cirebon dirumuskan secara teknokratik dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis daerah serta memedomani Prioritas Nasional. Begitu juga strategi dan arah kebijakan perangkat daerah juga



dirumuskan secara teknokratik dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis perangkat daerah serta mempedomani Prioritas Nasional yang diselenggarakan oleh kementerian/lembaga terkait. Dalam kerangka tersebut, Pemerintah Kabupaten Cirebon merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara terpadu dan integral untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna).

Dalam konteks Rancangan RPJMD Kabupaten Cirebon, maka rumusan strategi harus menunjukkan komitmen politik yang kuat dari Pemerintahan Kabupaten Cirebon untuk menciptakan output dan outcome bagi para pemangku kepentingan dalam pembangunan daerah. Strategi harus dilengkapi dengan indikator kinerja utama, indikator keberhasilan atau kegagalan suatu strategi, untuk mengukur keberhasilannya. Selain itu juga untuk menciptakan budaya berpikir strategis untuk menjamin transformasi menuju pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang lebih baik, transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja, strategi harus dikendalikan dan dievaluasi.

Perencanaan daerah merupakan penerjemahan dari visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam rencana kerja strategis yang dapat dioperasionalkan. Hal-hal strategis mencakup segala sesuatu yang secara langsung dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD. Rumusan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah bertujuan untuk memberikan pedoman dalam merumuskan capaian target kinerja pembangunan. Pendekatan komprehensif digunakan dalam langkah-langkah penyusunan perencanaan pembangunan daerah.

Oleh karena itu, perencanaan pembangunan daerah menjelaskan strategi yang akan diterapkan dan dikembangkan oleh Pemda dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Strategi harus disesuaikan dengan kekuatan sumber daya (potensi) yang dimiliki oleh daerah dalam menjawab permasalahan pembangunan yang ada, disesuaikan dengan target pencapaian yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Selain itu, perlu ada penjelasan tentang bagaimana pemerintah daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD secara efektif dan efisien. Strategi menjabarkan langkah-langkah sistematis mencapai visi dan misi melalui berbagai



program prioritas indikatif. Selanjutnya diperjelas dengan kebijakan umum untuk mendapatkan gambaran nyata bagaimana langkah-langkah strategis dilakukan dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun ke depan. Arah kebijakan pembangunan daerah akan mengarahkan langkah dan waktu pencapaian indikator masing-masing sasaran dan sekaligus memberi pedoman rentang waktu pelaksanaan suatu strategi dalam kurun waktu 2019 - 2024 sebagai perodesasi dari dokumen RPJMD Kabupaten Cirebon.

Strategi dan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 - 2024 juga harus selaras dengan periode perencanaan yang tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005 - 2025. Berdasarkan dokumen RPJPD, periode RPJMD saat ini berada dalam periode keempat dengan Visi yaitu “Terbangunnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang Beriman dan Produktif Menuju Masyarakat Kabupaten Cirebon yang Sejahtera”. Pada periode keempat RPJPD Kabupaten Cirebon pelaksanaan pembangunan dilaksanakan untuk mewujudkan tercapainya masyarakat yang sejahtera disegala bidang yang ditandai dengan peningkatan angka Indeks Pembangunan Manusia.

Berdasarkan penjelasan di atas dan dengan berpedoman pada rumusan keterkaitan antara visi dan misi dengan rumusan tujuan, dan sasaran sebagaimana telah diuraikan pada Bab-bab sebelumnya, maka dirumuskan strategi dan arah kebijakan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019 - 2024 yang merupakan penjabaran dari setiap sasaran sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.

6.1. STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah Kabupaten Cirebon yang telah ditetapkan. Rumusan strategi yang disusun akan menunjukkan kemantaban pemerintah daerah dalam memegang prinsipnya sebagai pelayan masyarakat. Nilai tambah (*value added*) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitas akan terwujud



jika perencanaan dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan daerah. Rumusan strategi merupakan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah yang akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Strategi pembangunan daerah disusun melalui kajian-kajian, analisis, hingga evaluasi pembangunan periode sebelumnya. Beberapa langkah yang ditempuh untuk menentukan strategi pembangunan jangka menengah Kabupaten Cirebon antara lain:

1. Mengkaji sasaran pembangunan periode sebelumnya maupun periode pembangunan yang akan datang (periode lima tahunan);
2. Mengkaji gambaran umum kondisi daerah dan capaian pembangunan sampai dengan periode awal perencanaan serta permasalahan pembangunan terpenting dan isu-isu strategis pembangunan daerah;
3. Melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengukur kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi oleh daerah (khususnya pemerintahan daerah);
4. Merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan (*key success factors*) dan pengembangan berbagai kerangka kebijakan dari strategi-strategi yang dirancang berdasarkan analisis sebelumnya;
5. Mengevaluasi berbagai alternatif strategi dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki dan kondisi eksternal yang dihadapi; serta
6. Memilih strategi yang paling sesuai untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah dengan memerhatikan arah kebijakan yang efektif untuk mencapai sasaran pembangunan.

Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed-management*). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian



arah kebijakan. Prinsip-prinsip yang dikembangkan dalam perumusan strategi pembangunan Kabupaten Cirebon adalah :

1. Strategi dapat menyeimbangkan berbagai kepentingan yang saling bertolak-belakang;
2. Strategi didasarkan pada capaian kinerja pembangunan dan pemenuhan kebutuhan layanan yang berbeda tiap segment masyarakat pengguna layanan, dan pemangku kepentingan;
3. Layanan yang bernilai tambah diciptakan secara berkelanjutan dalam proses internal Pemerintah Daerah; dan
4. Strategi terdiri dari tema-tema yang secara simultan saling melengkapi membentuk yang cerita atau skenario strategi.

Salah satu metode untuk menentukan strategi dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah penggunaan analisis SWOT. Metode ini digunakan karena lebih sederhana dan banyak dipahami oleh *stakeholders* pembangunan di Kabupaten Cirebon. Analisis SWOT (*Strength, Weaknesses, Opportunities, dan Threats*) dilakukan terlebih dahulu agar penentuan alternatif strategi pencapaian dari setiap indikator sasaran atau kumpulan sasaran yang inheren. Input utama yang digunakan dalam analisis SWOT adalah hasil telaah dari isu-isu strategis yang telah dirumuskan dalam bab sebelumnya. Isu-isu strategis tersebut selanjutnya dikelompokkan ke dalam faktor internal atau eksternal.

Berdasarkan identifikasi faktor-faktor internal dan eksternal di atas, dirumuskan strategi-strategi yang terbagi ke dalam empat kuadran. Kuadran I adalah strategi S-O yang merupakan strategi untuk menggunakan kekuatan atau strength (S) untuk memanfaatkan kesempatan atau opportunities (O). Kuadran II adalah strategi W-O yang merupakan



strategi untuk meminimalkan kelemahan atau weakness (W) dengan memanfaatkan kesempatan atau opportunities (O). Kuadran III adalah strategi S-T yang merupakan strategi untuk menggunakan kekuatan atau strength (S) guna menjawab tantangan threats (T) yang dihadapi. Sedangkan, Kuadran IV adalah strategi W-T yang merupakan strategi untuk meminimalkan kelemahan atau weakness (W) dengan menjawab tantangan threats (T) yang dihadapi.

Berdasarkan analisis di atas, strategi Kabupaten Cirebon untuk periode pembangunan 2019-2024 secara terperinci adalah sebagai berikut :

- Strategi 1. Optimalisasi, perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kekayaan dan keragaman budaya**
- Strategi 2. Pengembangan fasilitasi aktifitas-aktifitas masyarakat yang berorientasi pengembangan budaya**
- Strategi 3. Penguatan institusi-institusi budaya yang berakar pada nilai-nilai lokal**
- Strategi 4. Pengarusutamaan pengembangan budaya dalam perencanaan daerah dan desa**
- Strategi 5. Pengembangan sektor wisata berbasis budaya melalui Pengembangan Promosi kegiatan wisata dengan memanfaatkan budaya lokal**
- Strategi 6. Pengembangan SDM pelaku wisata budaya**
- Strategi 7. Peningkatan aksesibilitas dan pemerataan kualitas pendidikan serta peningkatan kualitas SDM bidang pendidikan**
- Strategi 8. Peningkatan kualitas kesehatan dan keterjangkauan cakupan layanan kesehatan**
- Strategi 9. Perlindungan sosial bagi kelompok rentan**
- Strategi 10. Perluasan kesempatan kerja yang didukung oleh peningkatan daya saing tenaga kerja**
- Strategi 11. Penguatan kelompok usaha dalam rangka membangun kemandirian ekonomi berbasis potensi lokal yang mendukung ekonomi unggulan kabupaten**
- Strategi 12. Peningkatan Investasi untuk mendorong tumbuhnya peluang kerja**



- Strategi 13.** Peningkatan peran pemuda dalam pembangunan
- Strategi 14.** Optimalisasi penegakan regulasi ketertiban umum dan peningkatan keshalehan sosial
- Strategi 15.** Peningkatan kerukunan antar umat beragama
- Strategi 16.** Pengembangan potensi usaha pertanian, perdagangan, perindustrian dan jasa berbasis sumber daya lokal
- Strategi 17.** Penciptaan pusat-pusat pengembangan baru berbasis pada kegiatan ekonomi unggulan
- Strategi 18.** Peningkatan daya saing komoditas unggulan berdasarkan keunggulan kompetitif dan komparatif
- Strategi 19.** Pengembangan ekonomi inklusif dan berkeadilan
- Strategi 20.** Penguatan Ketahanan Pangan Daerah berbasis produksi pangan lokal
- Strategi 21.** Penyediaan prasarana dan sarana infrastruktur transportasi, sumberdaya air dan permukiman yang handal dan terintegrasi guna mendukung terciptanya keseimbangan pembangunan wilayah
- Strategi 22.** Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
- Strategi 23.** Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah
- Strategi 24.** Optimalisasi manajemen pelayanan publik dengan mengedepankan pelayanan prima
- Strategi 25.** Optimalisasi pendapatan asli daerah
- Strategi 26.** Integrasi perencanaan, penganggaran, pengawasan dan pelaporan
- Strategi 27.** Penguatan tatakelola pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) dan berorientasi pada pencapaian smart governance
- Strategi 28.** Peningkatan tata kelola dan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik (good governance)
- Strategi 29.** Optimalisasi Dana Desa dari APBN dalam rangka meningkatkan status kemajuan dan kemandirian desa serta sinergitas pencapaian prioritas pembangunan daerah dan prioritas pembangunan desa



Strategi 30. Peningkatan dan pengembangan ekonomi lokal di desa terutama Badan Usaha Milik Desa

Strategi 31. Peningkatan peran dan sinergitas semua stakeholder dalam percepatan pembangunan kawasan perdesaan

Strategi 32. Peningkatan upaya pencegahan-pencegahan dan pemeliharaan ketentraman, ketertiban dan keamanan lingkungan

Strategi 33. Pencapaian efektifitas penyelenggaraan penanggulangan bencana

Strategi-strategi tersebut disusun untuk mencapai sasaran strategis pembangunan daerah. Setiap strategi harus mampu diarahkan untuk mencapai sasaran pembangunan yang dituju dan mendukung pencapaian misi yang telah ditetapkan. Strategi merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif tentang bagaimana pemerintah daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien.

6.2 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

Strategi merupakan serangkaian skenario-skenario selama 5 tahun yang dipandu dengan arah kebijakan dan dipayungi oleh tema/fokus tahunan. Strategi terdiri dari langkah-langkah dalam sasaran yang secara berkesinambungan saling melengkapi dan membentuk suatu arah yang selanjutnya menjadi arah kebijakan pembangunan setiap tahunnya. Arah kebijakan merupakan usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang konkret untuk memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Selain itu, arah kebijakan pembangunan daerah juga merupakan pedoman untuk menentukan tema tahapan pembangunan selama lima tahun periode kepala daerah guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap untuk penyusunan dokumen RPJMD.

Penyusunan arah kebijakan mempertimbangkan urgensi suatu permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan untuk menentukan tahapan dan prioritas untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Arah kebijakan berfungsi untuk menyelaraskan strategi-



strategi pembangunan daerah dan dokumen perencanaan lainnya sehingga didapatkan langkah-langkah pencapaian tujuan sasaran yang saling bersinergi untuk mencapai tujuan dan sasaran untuk lima tahun ke depan. Lebih lanjut penjelasan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 yang dikorelasikan dengan strategi pembangunan dapat dilihat pada Gambar 6.1 di bawah ini.

Tabel 6.1 Strategi dan Arah Kebijakan Kabupaten Cirebon

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1. Optimalisasi, perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kekayaan dan keragaman budaya	Meningkatkan pengembangan dan pelestarian kekayaan dan keragaman budaya lokal yang strategis untuk direvitalisasi
2. Pengembangan fasilitasi aktifitas-aktifitas masyarakat yang berorientasi pengembangan budaya	Meningkatkan pelestarian Tata Nilai Budaya
	mengembangkan potensi budaya yang dimiliki oleh masyarakat
	Internalisasi nilai-nilai budaya dalam dunia pendidikan
3. Penguatan institusi-institusi budaya yang berakar pada nilai-nilai lokal	Pendataan institusi budaya yang masih aktif dan yang pernah ada
	Pembinaan, revitalisasi dan kerjasama institusi budaya lokal
4. Pengarusutamaan pengembangan budaya dalam perencanaan daerah dan desa	Mengoptimalkan pembentukan rintisan desa/kampung budaya
	sinkronisasi dan sinergitas program kabupaten dan desa di bidang kebudayaan
5. Pengembangan sektor wisata berbasis budaya melalui Pengembangan Promosi kegiatan wisata dengan memanfaatkan budaya lokal	mengembangkan paket-paket wisata budaya dan kerjasama dalam promosi wisata
	menyelenggarakan event-event budaya yang dapat bermanfaat bagi pengembangan wisata



STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
6. Pengembangan SDM pelaku wisata budaya	meningkatkan Tata kelola keragaman budaya dan kesenian
	meningkatkan kapasitas, pengetahuan dan keterampilan pelaku usaha wisata budaya
7. Peningkatan aksesibilitas dan pemerataan kualitas pendidikan serta peningkatan kualitas SDM bidang pendidikan	Memperluas jaminan akses dan fasilitas pendidikan dasar
	meningkatkan kualitas layanan dan pendidikan yang inklusif
	Melakukan Penguatan pendidikan karakter berbasis keluarga
	meningkatkan Kualitas SDM bidang pendidikan
8. Peningkatan kualitas kesehatan dan keterjangkauan cakupan layanan kesehatan	Memperluas akses cakupan layanan kesehatan bagi masyarakat
	meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui kualitas layanan kesehatan
	mengembangkan dan penguatan KIE Kesehatan Keluarga
	meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kesehatan dan menjaga kebersihan lingkungan
	meningkatkan pelayanan Keluarga Berencana,
9. Perlindungan sosial bagi kelompok rentan	Fasilitasi jaminan sosial bagi warga rentan
	Pendampingan kelompok usaha bagi warga rentan
	meningkatkan Partisipasi Perempuan dan Anak dalam pembangunan
10. Perluasan kesempatan kerja yang didukung oleh peningkatan daya saing tenaga kerja	Harmonisasi kompetensi SDM yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja



STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	meningkatkan kualitas, produktifitas dan perlindungan bagi tenaga kerja
11. Penguatan kelompok usaha dalam rangka membangun kemandirian ekonomi berbasis potensi lokal yang mendukung ekonomi unggulan kabupaten	mengoptimalikan Balai Latihan Kerja (BLK) dan BLK Komunitas dalam memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat
12. Peningkatan Investasi untuk mendorong tumbuhnya peluang kerja	Meningkatkan kualitas kelembagaan dan tata kelola koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan BUMDes
13. Peningkatan peran pemuda dalam pembangunan	Kemudahan perizinan, insentif pajak dan konsistensi kebijakan daerah untuk mendukung iklim investasi
14. Optimalisasi penegakan regulasi ketertiban umum dan peningkatan keshalehan sosial	Mendorong Peran dan Kreativitas pemuda dalam keolahragaan dan kepeloporan pemuda
	meningkatkan peran serta masyarakat dan penegak aturan untuk mengurangi penyakit masyarakat (PEKAT)
	meningkatkan kualitas layanan kegiatan keagamaan
	Internalisasi nilai-nilai agama dalam dunia pendidikan
15. peningkatan kerukunan antar umat beragama	memperkuat dan mengoptimalkan peran Forum Antar Umat Beragama dalam rangka menjaga kerukunan antar umat beragama
	Menjalin dan meningkatkan kemitraan dengan lembaga sosial keagamaan seperti DMI, Organisasi NU, Muhammadiyah dll
16. Pengembangan potensi usaha pertanian, perdagangan,	Mengoptimalkan dukungan sektor swasta dalam pemerataan ekonomi



STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
<p>perindustrian dan jasa berbasis sumber daya lokal</p>	<p>meningkatkan kemitraan strategis dengan sektor swasta (public private partnership) untuk mendukung pengembangan ekonomi lokal</p>
	<p>Melakukan perlindungan kawasan pertanian dan perikanan</p>
<p>17. Penciptaan pusat-pusat pengembangan baru berbasis pada kegiatan ekonomi unggulan</p>	<p>Mengembangkan sektor ekonomi inklusif berbasis pariwisata yang didukung oleh potensi daerah dan budaya lokal yang berdaya saing</p>
	<p>Mengembangkan sumberdaya ekonomi lokal yang dapat memicu perkembangan wilayah dan memberikan dampak kemajuan pada daerah sekitarnya</p>
<p>18. Peningkatan daya saing komoditas unggulan berdasarkan keunggulan kompetitif dan komparatif</p>	<p>memperbaiki tata niaga, jalur dan rantai distribusi barang</p>
	<p>Melakukan pengawasan peredaran barang dan sarana prasarana produksi</p>
	<p>memperluas sumber pendapatan alternatif</p>
	<p>menambah akses pasar rakyat</p>
	<p>mengembangkan sektor pertanian, industri, perdagangan dan jasa</p>
<p>19. Pengembangan ekonomi inklusif dan berkeadilan</p>	<p>Meningkatkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui afirmasi kebijakan untuk usaha-usaha produktif.</p>
<p>20. Penguatan Ketahanan Pangan Daerah berbasis produksi pangan lokal</p>	<p>meningkatkan produksi sektor pertanian</p>
	<p>Memperbaiki tata kelola distribusi pangan daerah</p>
	<p>Memperbaiki pola konsumsi dan peningkatan keamanan pangan</p>



STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
<p>21. Penyediaan prasarana dan sarana infrastruktur transportasi, sumberdaya air dan permukiman yang handal dan terintegrasi guna mendukung terciptanya keseimbangan pembangunan wilayah</p>	<p>Mewujudkan infrastruktur yang berkeadilan antar wilayah dan konektivitas antar wilayah terutama pada kawasan pusat pertumbuhan wilayah dan kawasan perbatasan berbasis keruangan</p>
<p>22. Peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup</p>	<p>peningkatan manajemen dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup</p>
<p>23. Optimalisasi manajemen pelayanan publik dengan mengedepankan pelayanan prima</p>	<p>Meningkatkan intensitas , profesionalitas dan kapasitas dan kesejahteraan sumber daya aparatur pemerintahan daerah</p>
	<p>menyederhanakan mekanisme dan standar pelayanan</p>
	<p>Meningkatkan mutu penyelenggaraan kearsipan daerah dan kinerja pengelolaan kearsipan</p>
<p>24. Optimalisasi pendapatan asli daerah</p>	<p>meningkatkan kemampuan keuangan daerah dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah</p>
<p>25. Integrasi perencanaan, penganggaran, pengawasan dan pelaporan</p>	<p>meningkatkan akuntabilitas perencanaan, penganggaran, pengawasan dan pelaporan secara profesional dan inovatif</p>
<p>26. Penguatan tatakelola pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) dan berorientasi pada pencapaian smart governance</p>	<p>meningkatkan aksesibilitas , kemudahan dan kesederhanaan serta kepastian pelayanan publik</p>
	<p>Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang cerdas melalui revitalisasi reformasi birokrasi</p>
	<p>meningkatkan kualitas dan kebijakan</p>



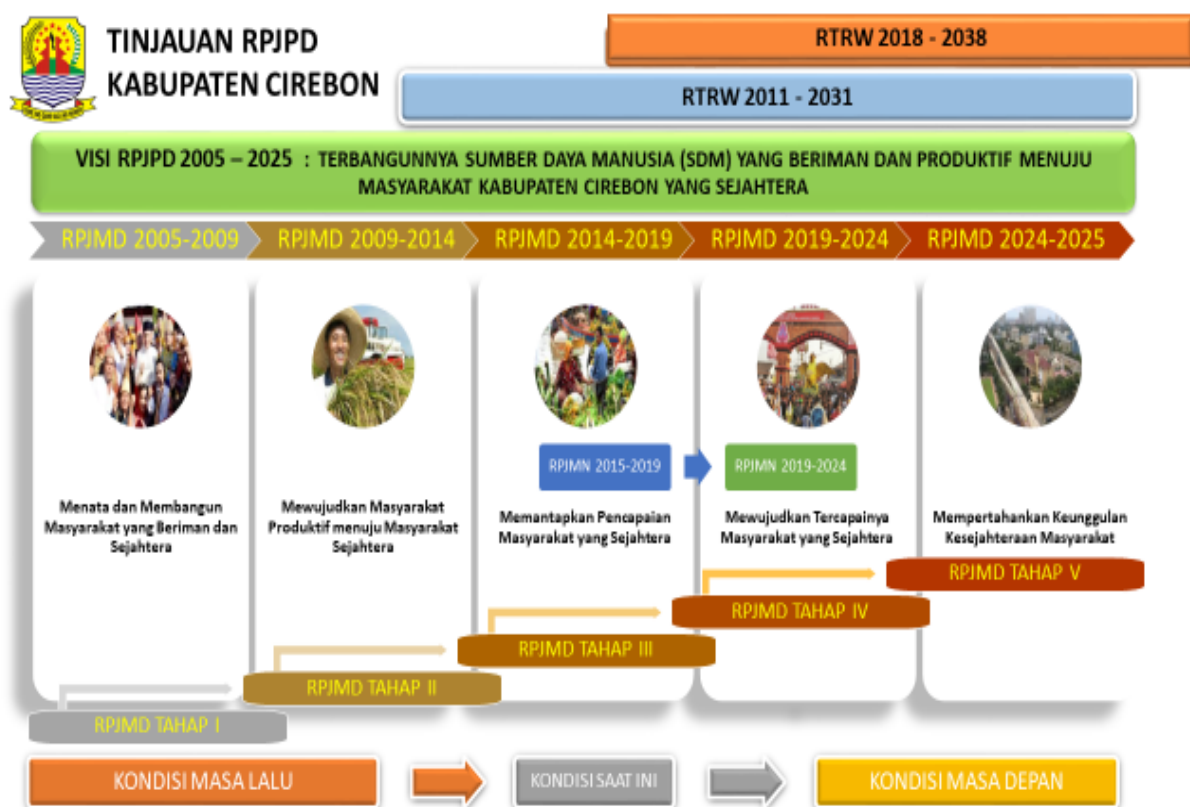
STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	publik yang partisipatif melalui kemudahan dan transparansi akses pengaduan masyarakat dan informasi produk hukum daerah
27. Peningkatan tata kelola dan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik (good governance)	Meningkatkan kapasitas pemerintah desa dalam menyelenggarakan pembangunan dan pelayanan publik serta Memperjelas kewenangan desa
	Meningkatkan kualitas SDM lembaga kemasyarakatan desa / kelurahan dalam perencanaan pembangunan desa
	Meningkatkan kapasitas pendamping desa dan Aparatur kecamatan selaku Pembina desa
28. Mengoptimalkan Dana Desa dari APBN dalam rangka meningkatkan status kemajuan dan kemandirian desa serta sinergitas pencapaian prioritas pembangunan daerah dan prioritas pembangunan desa	Mensinergikan perencanaan dan penganggaran desa / kelurahan dengan perencanaan dan penganggaran Pemerintah Daerah
	Meningkatkan kapasitas Aparatur pemerintahan desa / Kelurahan dalam perencanaan dan penganggaran Desa
29. Peningkatan dan pengembangan ekonomi lokal di desa terutama Badan Usaha Milik Desa	mendayagunakan aset desa dan keuangan desa untuk menyejahterakan masyarakat desa
	mengembangkan ekonomi desa yang menitik beratkan pada pemanfaatan potensi desa, peningkatan produktivitas; pembukaan lapangan kerja; serta kesejahteraan warga
30. Peningkatan peran dan sinergitas semua stakeholder dalam percepatan pembangunan kawasan perdesaan	menguatkan dan mengembangkan kapasitas SDM pelaku kawasan perdesaan dan peningkatan infrastruktur kawasan perdesaan



STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
<p>31. Peningkatan upaya pencegahan-pencegahan dan pemeliharaan ketentraman, ketertiban dan keamanan lingkungan</p>	<p>meningkatkan penegakan hukum dan pemeliharaan ketentraman, ketertiban masyarakat secara komprehensif serta peningkatan pencegahan tindak kriminal dengan melibatkan peran serta masyarakat</p>
<p>32. Pencapaian efektifitas penyelenggaraan penanggulangan bencana</p>	<p>Mengurangi risiko bencana dan meningkatkan ketangguhan pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi bencana</p>

Berdasarkan strategi dan arah kebijakan pembangunan yang telah dirumuskan, dapat dirumuskan tema/fokus tahunan pembangunan RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 sebagai landasan penyusunan RKPD tahunan selama periode berkenaan yang berlandaskan Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005-2025.

Gambar 6.1 Tinjauan RPJPD Kabupaten Cirebon 2005-2025





Penetapan tema atau fokus RPJMD Tahun 2019-2024 merupakan penjabaran dari tema atau fokus pembangunan tahap keempat pada RPJPD Kabupaten Cirebon Tahun 2005-2025, yaitu Mewujudkan Tercapainya Masyarakat Yang Sejahtera. Untuk mewujudkan tema pembangunan tahap keempat pada RPJPD Kabupaten Cirebon, maka tema atau fokus pembangunan lima tahunan (2019-2024) disajikan pada Gambar 6.2 berikut ini

Gambar 6.2 Tema/Fokus Tahunan RPJMD Kabupaten Cirebon



Merujuk arah kebijakan tahunan yang dituangkan dalam tema pembangunan di atas maka disampaikan keterkaitan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan pada Tabel 6.2 di bawah ini.



Tabel 6.2
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi
Kabupaten Cirebon

VISI: “TERWUJUDNYA KABUPATEN CIREBON YANG BERBUDAYA, SEJAHTERA, AGAMIS, MAJU DAN AMAN”			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
KABUPATEN CIREBON BERBUDAYA			
MISI 1: Mewujudkan masyarakat yang menjunjung tinggi dan melestarikan nilai-nilai budaya, tradisi dan adat istiadat			
1. Melestarikan dan menumbuh kembangkan budaya Masyarakat	1.1. Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya masyarakat	Optimalisasi, perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kekayaan dan keragaman budaya.	Meningkatkan pengembangan dan pelestarian kekayaan dan keragaman budaya lokal yang strategis untuk direvitalisasi
		Pengembangan fasilitasi aktifitas-aktifitas masyarakat yang berorientasi pengembangan budaya	Meningkatkan pelestarian Tata Nilai Budaya
			Pengembangan potensi budaya yang dimiliki oleh masyarakat
		Penguatan institusi-institusi budaya yang berakar pada nilai-nilai lokal.	Internalisasi nilai-nilai budaya dalam dunia pendidikan
Pendataan institusi budaya yang masih aktif dan yang pernah ada			
			Pembinaan, revitalisasi dan kerjasama institusi budaya lokal



		Pengarusutamaan pengembangan budaya dalam perencanaan daerah dan desa.	Mengoptimalkan pembentukan rintisan desa/kampung budaya
			sinkronisasi dan sinergitas program kabupaten dan desa di bidang kebudayaan
	1.2. Berkembangnya sektor wisata berbasis budaya.	Pengembangan sektor wisata berbasis budaya melalui Pengembangan Promosi kegiatan wisata dengan memanfaatkan budaya lokal	Pengembangan paket-paket wisata budaya dan kerjasama dalam promosi wisata
			Penyelenggaraan event-event budaya yang dapat bermanfaat bagi pengembangan wisata
		Pengembangan SDM pelaku wisata budaya.	Peningkatan Tata kelola keragaman budaya dan kesenian
			Peningkatan kapasitas, pengetahuan dan keterampilan pelaku usaha wisata budaya
KABUPATEN CIREBON SEJAHTERA			
MISI 2: Meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan dan ekonomi			
1. Mewujudkan pembangunan manusia yang berkualitas dan sejahtera	1.1. Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat.	Peningkatan aksesibilitas dan pemerataan kualitas pendidikan serta peningkatan kualitas SDM bidang pendidikan.	Perluasan jaminan akses dan fasilitasi pendidikan dasar
			Peningkatan kualitas layanan dan pendidikan yang inklusif



			Penguatan pendidikan karakter berbasis keluarga
			Peningkatan Kualitas SDM bidang pendidikan
			Meningkatkan minat baca masyarakat
	1.2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Peningkatan kualitas kesehatan dan keterjangkauan cakupan layanan kesehatan.	Memperluas akses cakupan layanan kesehatan bagi masyarakat
			Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui kualitas layanan kesehatan
			Pengembangan dan penguatan KIE Kesehatan Keluarga
			Peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kesehatan dan menjaga kebersihan lingkungan
			Peningkatan pelayanan keluarga berencana
	1.3 Menurunnya angka kemiskinan	Perlindungan sosial bagi kelompok rentan	Fasilitasi jaminan sosial bagi warga rentan
			Pendampingan kelompok usaha bagi warga rentan



			Mewujudkan smart society
			Penguatan perlindungan dan Partisipasi Perempuan dan Anak dalam pembangunan
	1.4. Menurunnya angka pengangguran	Perluasan kesempatan kerja yang didukung oleh peningkatan daya saing tenaga kerja.	Harmonisasi kompetensi SDM yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja
			Peningkatan kualitas, produktifitas dan perlindungan bagi tenaga kerja
			Optimalisasi Balai Latihan Kerja (BLK) dan BLK Komunitas dalam memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat
		Penguatan kelompok usaha dalam rangka membangun kemandirian ekonomi berbasis potensi lokal yang mendukung ekonomi unggulan kabupaten.	Penguatan kelembagaan dan tata kelola koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan BUMDes
		Peningkatan Investasi untuk mendorong tumbuhnya peluang kerja.	Kemudahan perizinan, insentif pajak dan konsistensi kebijakan daerah untuk mendukung iklim investasi



	1.5 Meningkatnya Prestasi olahraga dan peranan pemuda dalam pembangun	Peningkatan peran pemuda dalam pembangunan	Mendorong Peran dan Kreativitas pemuda dalam keolahragaan dan kepeloporan pemuda
KABUPATEN CIREBON AGAMIS			
MISI 3: Meningkatnya kualitas hidup masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai-nilai agama, budi pekerti, santun dan beretika			
1. Meningkatkan keshalehan sosial dan kerukunan antar dan inter umat beragama	1.1. Menurunnya angka asusila masyarakat.	Optimalisasi penegakan regulasi ketertiban umum dan peningkatan keshalehan sosial.	meningkatkan peran serta masyarakat dan penegak aturan untuk mengurangi penyakit masyarakat (PEKAT) meningkatkan kualitas layanan kegiatan keagamaan Internalisasi nilai-nilai agama dalam dunia pendidikan
	1.2. Menurunnya pergesekan (friksi) antar dan internal umat beragama	peningkatan kerukunan antar umat beragama.	memperkuat dan mengoptimalkan peran Forum Antar Umat Beragama dalam rangka menjaga kerukunan antar umat beragama Menjalin dan meningkatkan kemitraan dengan lembaga sosial keagamaan seperti DMI, Organisasi NU, Muhammadiyah dll



KABUPATEN CIREBON MAJU			
MISI 4: Meningkatnya produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul, sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional dan regional yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah yang berkeadilan berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan.	1.1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan.	Pengembangan potensi usaha pertanian, perdagangan, perindustrian dan jasa berbasis sumber daya lokal.	Mengoptimalkan dukungan sektor swasta dalam pemerataan ekonomi
			Meningkatkan kemitraan strategis dengan sektor swasta (public private partnership) untuk mendukung pengembangan ekonomi lokal
			Melakukan perlindungan kawasan pertanian dan perikanan
			Mengembangkan sektor ekonomi inklusif berbasis pariwisata yang didukung oleh potensi daerah dan budaya lokal yang berdaya saing
		Penciptaan pusat-pusat pengembangan baru berbasis pada kegiatan ekonomi unggulan dan mewujudkan smart economy	Mengembangkan sumberdaya ekonomi lokal yang dapat memicu perkembangan wilayah dan memberikan dampak kemajuan pada daerah sekitarnya



Tujuan		Peningkatan daya saing komoditas unggulan berdasarkan keunggulan kompetitif dan komparatif dan mengembangkan smart branding	Melakukan pengawasan peredaran barang dan sarana prasarana produksi memperluas sumber pendapatan alternatif menambah akses pasar rakyat mengembangkan sektor pertanian, industri, perdagangan dan jasa Melakukan pengawasan peredaran barang dan sarana prasarana produksi
		Pengembangan ekonomi inklusif dan berkeadilan.	Meningkatkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui afirmasi kebijakan untuk usaha-usaha produktif.
	1.2. Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat.	Penguatan Ketahanan Pangan Daerah berbasis produksi pangan lokal.	Meningkatkan produksi sektor pertanian Memperbaiki tata kelola distribusi pangan daerah
			Memperbaiki Pola konsumsi dan peningkatan keamanan pangan
	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	1.3. Meningkatnya penyediaan	Penyediaan prasarana dan sarana infrastruktur transportasi,	Mewujudkan infrastruktur yang berkeadilan antar wilayah dan



	layanan infrastruktur wilayah.	sumberdaya air dan permukiman yang handal dan terintegrasi guna mendukung terciptanya keseimbangan pembangunan wilayah	konektivitas antar wilayah terutama pada kawasan pusat pertumbuhan wilayah dan kawasan perbatasan berbasis keruangan
	1.4. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.	Peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.	meningkatkan manajemen dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup
			Meningkatkan pengawasan dan pengendalian lingkungan
			Meningkatkan kualitas dan penyediaan air serta kualitas udara
			Mewujudkan dan menyusun roadmap smart environment
			Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah
2. Terselenggara nya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	3.1. Meningkatnya kapasitas pemerintah dan kualitas pelayanan publik	Optimalisasi manajemen pelayanan publik dengan mengedepankan pelayanan prima.	Meningkatkan intensitas , profesionalitas dan kapasitas dan kesejahteraan sumber daya aparatur pemerintahan daerah
			menyederhanakan mekanisme dan standar pelayanan



			Meningkatkan mutu penyelenggaraan kearsipan daerah dan kinerja pengelolaan kearsipan
		Optimalisasi pendapatan asli daerah	meningkatkan kemampuan keuangan daerah terutama pendapatan asli daerah dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah
3.2. Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah	Integrasi perencanaan, penganggaran, pengawasan dan pelaporan.		meningkatkan Akuntabilitas perencanaan, penganggaran, pengawasan dan pelaporan secara profesional dan inovatif
3.3. Meningkatnya maturitas pemerintahan berbasis elektronik.	Penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan berorientasi pada pencapaian <i>smart governance</i> .		meningkatkan aksesibilitas , kemudahan dan kesederhanaan serta kepastian pelayanan public
			Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang cerdas melalui revitalisasi reformasi birokrasi dan menyusun roadmap Smart Governance
			meningkatkan kualitas dan kebijakan publik yang partisipatif melalui



			kemudahan dan transparansi akses pengaduan masyarakat dan informasi produk hukum daerah
3.4. Meningkatnya kemajuan dan Kemandirian Desa.	Peningkatan tata kelola dan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik (good governance)	Meningkatkan kapasitas pemerintah desa dalam menyelenggarakan pembangunan dan pelayanan publik serta Memperjelas kewenangan desa.	
		Meningkatkan kualitas SDM lembaga kemasyarakatan desa / kelurahan dalam perencanaan pembangunan desa	
		Meningkatkan kapasitas pendamping desa dan Aparatur kecamatan selaku Pembina desa	
		Mensinergikan perencanaan dan penganggaran desa / kelurahan dengan perencanaan dan penganggaran Pemerintah Daerah	
	Mengoptimalkan Dana Desa dari APBN dalam rangka meningkatkan status kemajuan dan kemandirian desa serta sinergitas pencapaian prioritas pembangunan daerah dan prioritas pembangunan desa	Meningkatkan kapasitas Aparatur pemerintahan desa dalam perencanaan dan penganggaran Desa	
	Peningkatan Pengembangan Ekonomi Lokal di Desa terutama	mendayagunakan aset desa dan keuangan desa untuk menyejahterakan masyarakat desa	



		Badan Usaha Milik Desa	mengembangkan ekonomi desa yang menitik beratkan pada pemanfaatan potensi desa, peningkatan produktivitas; pembukaan lapangan kerja; serta kesejahteraan warga
		Peningkatan peran dan sinergitas semua stakeholder dalam percepatan pembangunan kawasan perdesaan.	menguatkan dan mengembangkan kapasitas SDM pelaku kawasan perdesaan dan peningkatan infrastruktur kawasan perdesaan
KABUPATEN CIREBON AMAN			
MISI 5: Memelihara keamanan ketertiban umum untuk mewujudkan kondusivitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional			
1. Meningkatkan keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat	1.1. meningkatkan ketertiban umum	Peningkatan upaya pencegahan-pencegahan dan pemeliharaan ketentraman, ketertiban dan keamanan lingkungan	Meningkatkan penegakan hukum dan pemeliharaan ketentraman, ketertiban masyarakat secara komprehensif serta peningkatan pencegahan tindak kriminal dengan melibatkan peran serta masyarakat
	1.2. Menurunnya resiko bencana.	Pencapaian efektifitas penyelenggaraan penanggulangan bencana.	Mengurangi risiko bencana dan meningkatkan ketangguhan pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi bencana



6.3 Strategi dan Arah Kebijakan dengan Pendekatan Spasial

Pendekatan spasial mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2038, khususnya dalam menyelaraskan kebijakan ruang antar wilayah, antar sektor dan dimensi waktu pembangunan RPJMD Tahun 2019-2024. Fungsi RTRW Kabupten adalah :

- a. Acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- b. Acuan dalam pemanfaatan ruang/pengembangan wilayah di Kabupaten Cirebon.
- c. Acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah Kabupaten Kabupaten Cirebon
- d. Acuan lokasi investasi dalam wilayah kabupaten yang dilakukan pemerintah, masyarakat, dan swasta.
- e. Pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang di wilayah kabupaten.
- f. Dasar pengendalian pemanfaatan ruang dalam penataan/pengembangan wilayah kabupaten yang meliputi penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi
- g. Acuan dalam administrasi pertanahan.

Strategi dan arah kebijakan pembangunan tahun 2019-2024 yang telah dirumuskan dengan pendekatan holistic-tematik dan integratif selain memperhatikan pelaksanaan urusan sesuai kewenangan kabupaten harus mengadopsi kebijakan penataan ruang yang terkait pengembangan wilayah, pengembangan struktur, dan pola ruang. Kebijakan penataan ruang merupakan arahan dalam mencapai tujuan Penataan ruang wilayah kabupaten Cirebon yaitu untuk mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang aman, nyaman, produktif, berkelanjutan, harmonis, dan terpadu sebagai sentra pertanian, industri dan pariwisata yang mendukung PKN Cirebon.



Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon adalah :

- 1) Kebijakan untuk mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang aman, nyaman, produktif, berkelanjutan, harmonis, dan terpadu, meliputi:
 - a. pengembangan kawasan lindung dan kawasan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; dan
 - b. peningkatan keterkaitan dan keterpaduan pengembangan kawasan yang berbatasan dengan kabupaten/kota tetangga.

Strategi untuk pengembangan kawasan lindung dan kawasan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budidaya;
- b. mengembangkan ruang terbuka hijau dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan;
- c. mengembangkan kegiatan budidaya unggulan beserta prasarana untuk mendorong pengembangan perekonomian kawasan dan wilayah sekitarnya; dan
- d. mengendalikan perkembangan kegiatan budidaya di kawasan rawan bencana untuk meminimalkan potensi kerugian akibat bencana.

Strategi untuk peningkatan keterkaitan dan keterpaduan pengembangan kawasan yang berbatasan dengan kabupaten/kota tetangga meliputi:

- a. menjaga keterkaitan dan keterpaduan dalam mengembangkan kawasan perbatasan dengan kabupaten/ kota tetangga;
 - b. mengembangkan pusat pertumbuhan baru di kawasan yang berbatasan dengan kabupaten/kota tetangga; dan
 - c. meningkatkan koordinasi dalam mengembangkan kawasan yang berbatasan dengan kabupaten/kota tetangga
- 2) Kebijakan untuk mewujudkan ruang wilayah kabupaten sebagai sentra pertanian, meliputi:
 - a. perwujudan lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan;



- b. pengembangan jaringan sumber daya air untuk meningkatkan produktivitas lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
- c. pengembangan kawasan pesisir dan laut sesuai potensi serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Strategi untuk perwujudan lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. mempertahankan luas lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
- b. mengendalikan alih fungsi peruntukan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
- c. meningkatkan aksesibilitas, meningkatkan ketahanan pangan, penyediaan alat teknologi pra pasca panen, dan pengembangan pasca pertanian.

Strategi untuk pengembangan jaringan sumber daya air untuk meningkatkan produktivitas lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. mengembangkan dan memelihara bendungan, waduk, dan situ untuk menjamin ketersediaan air baku bagi kegiatan pertanian; dan
- b. mengembangkan dan memelihara jaringan irigasi teknis pada daerah irigasi untuk menjamin penyaluran air bagi lahan pertanian.

Strategi untuk pengembangan kawasan pesisir dan laut sesuai potensi serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup meliputi:

- a. mengembangkan sentra budidaya perikanan air payau, dan sentra budidaya garam; dan
- b. mengembangkan sarana dan prasarana untuk menunjang Pengembangan kegiatan budidaya di kawasan pesisir dan laut.

3) Kebijakan untuk mewujudkan ruang wilayah kabupaten sebagai sentra industri, meliputi:

- a. peningkatan fungsi kawasan industri untuk meningkatkan daya saing kawasan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; dan



- b. pengembangan kawasan untuk kegiatan industri yang berdaya saing dan ramah lingkungan.

Strategi untuk peningkatan fungsi kawasan industri untuk meningkatkan daya saing kawasan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:

- a. mengembangkan dan meningkatkan kualitas prasarana dan sarana penunjang kegiatan industri; dan
- b. meningkatkan penataan lokasi kegiatan industri di dalam kawasan industri.

Strategi untuk pengembangan kawasan untuk kegiatan industri yang berdaya saing dan ramah lingkungan meliputi:

- a. mengembangkan kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan industri; dan
- b. mengembangkan prasarana dan sarana penunjang kegiatan industri.

- 4) Kebijakan untuk mewujudkan ruang wilayah kabupaten sebagai sentra pariwisata, meliputi:

- a. pengembangan kawasan peruntukan pariwisata;
- b. pengembangan kawasan perkotaan sebagai pusat pariwisata; dan
- c. pengembangan keterpaduan antar pusat pariwisata.

Strategi untuk pengembangan kawasan peruntukan pariwisata meliputi:

- a. merehabilitasi kawasan peruntukan pariwisata yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budidaya;
- b. mengembangkan wisata religi dan wisata bahari; dan
- c. mengembangkan prasarana dan sarana pendukung kegiatan pariwisata.

Strategi untuk pengembangan kawasan perkotaan sebagai pusat pariwisata, meliputi:

- a. mengembangkan pusat jasa dan promosi pariwisata di kawasan perkotaan;



- b. memantapkan akses prasarana dan sarana untuk meningkatkan keterkaitan antara kawasan perkotaan dan kawasan-kawasan pariwisata.

Strategi untuk pengembangan keterpaduan antar pusat pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, dengan meningkatkan keterkaitan dengan PKN di Provinsi Jawa Barat sebagai pusat pariwisata dalam kesatuan tujuan pariwisata

- 5) Kebijakan untuk mewujudkan ruang wilayah kabupaten sebagai pendukung PKN Cirebon, adalah peningkatan fungsi dan pengembangan kawasan perkotaan sebagai pusat perdagangan dan jasa yang berskala nasional sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Strategi untuk peningkatan fungsi dan pengembangan kawasan perkotaan sebagai pusat perdagangan dan jasa yang berskala nasional sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (5), meliputi:

- a. mengembangkan kawasan perkotaan sebagai pusat perdagangan dan jasa yang berskala nasional; dan
- b. mengembangkan dan memantapkan prasarana dan sarana untuk meningkatkan keterkaitan antar pusat perdagangan dan jasa yang berskala nasional sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

6.4 Arah Kebijakan Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam



Pelayanan Dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak. Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah membawa perubahan kebijakan terkait dengan standar pelayanan minimal, bahwa sesuai ketentuan pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, standar pelayanan minimal hanya diterapkan pada urusan pemerintahan konkuren yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi: a. pendidikan; b. kesehatan; c. pekerjaan umum dan penataan ruang; d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman; e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan f. Sosial yang dalam pelaksanaannya berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.

Adapun Standar pelayanan minimal yang baru mengacu kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) terdapat 6 (enam) SPM Kabupaten, dengan rincian dan penerapannya dalam Tabel 6.3 sebagai berikut.

Tabel 6.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program Perangkat Daerah Terkait Pelaksanaan Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Program	Perangkat Daerah Penanggungjawab	
SPM Pendidikan					
1	pendidikan anak usia dini (Usia 5-6 tahun) berupa perlengkapan dasar peserta didik PAUD yang miskin	Program Pendidikan Anak Usia Dini	1	Meningkatnya Capaian Prosentase APK PAUD	Dinas Pendidikan
			2	Ketersediaan Sarana dan Prasarana Sekolah PAUD	Dinas Pendidikan



2	Pendidikan dasar (Usia 7-12 tahun) dan usia 12-15 tahun berupa perlengkapan dasar peserta didik SD dan SMP yang miskin	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun	1	Meningkatnya Capaian Prosentase APK SD/MI dan SMP/MTs	Dinas Pendidikan
			2	Meningkatnya Capaian Prosentase APM SD/MI dan SMP/MTs	Dinas Pendidikan
			Indikator Kinerja Program		Perangkat Daerah Penanggungjawab
			3	Meningkatnya prosentase capaian angka siswa yang melanjutkan sekolah SMP dan SMU	Dinas Pendidikan
			4	Ketersediaan Sarana dan Prasarana Sekolah SD dan SMP	Dinas Pendidikan
		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1	Meningkatnya Prosentase guru TK, SD, SMP, yang memiliki kualifikasi S1/D4	Dinas Pendidikan



			2	Meningkatnya Prosentase guru yang memiliki sertifikasi	Dinas Pendidikan
3	Pendidikan Kesetaraan (Usia 7-18 tahun) berupa perlengkapan dasar peserta didik pendidikan kesetaraan yang miskin	Program Pendidikan Non Formal		Meningkatnya angka kelulusan Paket A Setara SD, Paket B Setara SMP, Paket C Setara SMA	Dinas Pendidikan
SPM Kesehatan					
1	pelayanan kesehatan ibu hamil;	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan		Prosentase penanganan ibu hamil resiko tinggi	Dinas Kesehatan
No	Jenis Pelayanan Dasar	Program Perangkat Daerah Terkait Pelaksanaan Jenis Pelayanan Dasar		Indikator Kinerja Program	Perangkat Daerah Penanggungjawab
2	pelayanan kesehatan ibu bersalin;	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan		Prosentase penanganan ibu hamil resiko tinggi	Dinas Kesehatan
3	pelayanan kesehatan bayi baru lahir;	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita		Prosentase neo komplikasi yang ditangani	Dinas Kesehatan



4	pelayanan kesehatan balita;	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita		Prosentase neo komplikasi yang ditangani	Dinas Kesehatan
5	pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;	Program Upaya Kesehatan Masyarakat		Indeks keluarga sehat (IKS)	Dinas Kesehatan
6	pelayanan kesehatan pada usia produktif;	Program Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM)		Persentase penderita hipertensi dan DM yang dilayani sesuai standar	Dinas Kesehatan
7	pelayanan kesehatan pada usia lanjut;	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut		Prosentase pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar	Dinas Kesehatan
8	pelayanan kesehatan penderita hipertensi;	Program Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM)		Persentase penderita hipertensi yang dilayani sesuai standar	Dinas Kesehatan
9	pelayanan kesehatan penderita DM;	Program Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM)		Persentase penderita DM yang dilayani sesuai standar	Dinas Kesehatan
10	pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;	Program Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM)		Persentase penderita hipertensi dan DM yang dilayani sesuai standar	Dinas Kesehatan



No	Jenis Pelayanan Dasar	Program Perangkat Daerah Terkait Pelaksanaan Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Program	Perangkat Daerah Penanggungjawab
11	pelayanan kesehatan orang dengan TB;	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Penanggulangan KLB penyakit dan keracunan makanan 1 x 24 jam	Dinas Kesehatan
			Prosentase imunisasi dasar lengkap	
12	pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>HIV</i>),	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Penanggulangan KLB penyakit dan keracunan makanan 1 x 24 jam	Dinas Kesehatan
			Prosentase imunisasi dasar lengkap	
SPM Bidang Sosial				
1	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Program Pembinaan Anak Terlantar		Dinas Sosial
2	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)		Dinas Sosial



3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial			Dinas Sosial
4	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma			Dinas Sosial
No	Jenis Pelayanan Dasar	Program Perangkat Daerah Terkait Pelaksanaan Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Kinerja Program	Perangkat Daerah Penanggungjawab
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kabupaten	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial			Dinas Sosial
SPM Bidang Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat					
1	Pelayanan yang terkena Dampak Gangguan Trantibum akibat penegakan Hukum terhadap Penegakan Perda dan Perkada	Program Pemeliharaan Ketentraman Ketertiban Umum Linmas dan pencegahan Tindak Kriminal			Satpol Pamong Praja



No	Jenis Pelayanan Dasar	Program Perangkat Daerah Terkait Pelaksanaan Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Program	Perangkat Daerah Penanggungjawab
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (paling sedikit memuat) : a. Penyusunan Kajian Risiko bencana b. Komunikasi Informasi & Edukasi Rawan Bencana	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiagsiagaan terhadap Bencana	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran		Dinas Pemadam Kebakaran



SPM Bidang Pekerjaan Umum					
1	Pemenuhan kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah		Prosentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik yang dapat diberikan melalui dua cara yang terdiri dari Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T)	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah			
SPM Bidang Perumahan Rakyat					
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota merupakan jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, dengan ketentuan: 1) Pada saat masa pasca bencana; 2) Surat penetapan bencana dari Bupati/Walikota;	Program Pengembangan Perumahan		Peningkatan ketersediaan dan kualitas perumahan dan permukiman bagi masyarakat	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan



	dan/atau 3) Dampak bencana di daerah administrasi kabupaten				
2	<p>Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota merupakan jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka mendukung:</p> <p>1) Pengurangan kawasan kumuh 5-10 Ha; dan/atau</p> <p>2) Penataan perumahan dan kawasan permukiman yang berada di lahan bukit fungsi permukiman dan "tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya</p>	<p>Program Pengembangan Perumahan</p>		<p>Peningkatan ketersediaan dan kualitas perumahan dan permukiman bagi masyarakat</p>	<p>Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan</p>

6.5 PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2019-2024

Strategi dan arah kebijakan pembangunan merupakan dasar bagi penentuan prioritas pembangunan daerah. prioritas pembangunan daerah menjadi pelaksana dari arah kebijakan yang telah ditetapkan, sesuai



dengan rencana waktu pelaksanaan. Prioritas pembangunan daerah disajikan selama 5 (lima) tahun mulai Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024, disajikan berdasarkan sasaran pembangunan jangka menengah. Dengan sifat Prioritas pembangunan daerah yang bersifat strategis, maka pelaksanaan dan penganggarannya diutamakan. Penentuan Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Cirebon juga merupakan bentuk pelaksanaan program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2019-2024.

1. Kabupaten Cirebon **BERBUDAYA**

Membangun Wahana atau Gedung Pusat Budaya sebagai Pusat Kesenian dan Kebudayaan Masyarakat Kabupaten Cirebon.

Sebagai ajang kreativitas seni dan budaya lokal Kabupaten Cirebon yang masih eksis dan hampir punah dari para seniman dan budayawan Cirebon agar dapat tetap lestari. Revitalisasi Sanggar Seni Budaya, Cirebon Tematik Festival, Cagar Budaya Lestari. Wisata berbasis Budaya.

2. Kabupaten Cirebon **SEJAHTERA**

Dalam rangka menjamin kebutuhan dasar masyarakat terutama masyarakat pra sejahtera atau keluarga sangat miskin dan miskin sesuai indikator kemiskinan daerah/local dalam sistem yang terintegrasi (Kartu PEPEK Sejahtera). Kartu PEPEK ini merupakan kartu pelengkap bagi masyarakat miskin yang tidak tidak terlayani KIS atau Penerima Bantutan Iuran BPJS dari APBN, tidak terlayani Kartu Indonesia Pintar, Sembako Murah dan lain-lain. Mendorong pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di setiap desa dengan mengembangkan produk unggulan desa dan meningkatkan BUMDes yang berkembang atau BUMDes yang Berdaya.

3. Kabupaten Cirebon **AGAMIS**

Salah satu upaya yang dilakukan dengan mendirikan Pusat kegiatan Keagamaan di Kabupaten Cirebon (Masjid Raya dan Islamic Center).

Langkah berikutnya adalah memasukkan atau mengintegrasikan nilai-nilai agama dalam pendidikan formal. Kegiatan MDTA terintegrasi dalam kegiatan Ekstrakurikuler wajib Sekolah dasar.



Setelah urusan pemerintahan wajib terpenuhi dan sesuai kemampuan keuangan daerah, maka akan diberikan insentif bagi imam masjid dan musholah untuk menggerakkan melek huruf Al Quran dan gerakan magrib mengaji bagi umat Islam dan memberikan bantuan kepada pondok pesantren.

4. Kabupaten Cirebon **MAJU**

Mendorong kemajuan Kabupaten Cirebon melalui pembangunan pusat masyarakat ekonomi digital dalam rangka mendorong dan meningkatkan daya saing dan produk dari masyarakat Kabupaten Cirebon melalui Desa Pintar (memanfaatkan teknologi informasi. Membangun dan meningkatkan pembangunan infrastruktur berbasis keruangan atau sesuai dengan pola ruang dan struktur ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) terutama Pusat kegiatan Lokal dan Pusat Pengembangan Kota.

5. Kabupaten Cirebon **AMAN**

Membangun masyarakat Kabupaten Cirebon yang sadar hukum melalui desa sadar hukum dan bisa menjaga ketentraman dan ketertiban di masyarakat melalui Sistem keamanan lingkungan Siaga dan Desa Tangguh Bencana terutama desa atau daerah yang rawan bencana.

6.6 Proyek Strategis Nasional dan Provinsi Jawa Barat

Dalam perencanaan pembangunan jangka menengah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 juga tidak terlepas dari rencana dan pelaksanaan proyek strategis nasional dan proyek strategis Provinsi Jawa Barat Jawa Barat yang akan dilaksanakan di Kabupaten Cirebon, antara lain tercantum dalam tabel 6.4 di bawah.



Tabel 6.4 Kolaborasi Pendanaan Proyek Strategis Tahun 2018-2023

No	Kegiatan	Sumber Anggaran				Target
		APBN	APBD	KPBU	Swasta	
1.1	Penyediaan Air Minum					
1	SPAM Regional Cirebon Raya (Jatigede)/	√	√	√		2023
1.2	Bendungan dan Jaringan Irigasi					
	Bendungan Kuningan	√	√			2021
II	Infrastruktur Daerah					
2.1	Jalan Lingkar Cirebon (22,3 km)	√	√			2023
2.2	Reaktivasi jalur kereta api Cirebon-Kadipaten	√	√			2022
2.3	Pengembangan Pelabuhan Cirebon			√	√	Jangka pendek 2020
2.4	Pembangunan Alun-alun		√			2020-2022
	Pengadaan peralatan Command Center		√			2019
	Pembangunan/Revitalisasi pasar kue weru		√			2019
2.5	Pembangunan Creative centre		√			2020-2022
2.6	Pembangunan pusat budaya		√			2020-2022
2.7	Pembangunan TPPAS Regional Cirebon Raya	√	√	√		2022
	PPI Gebangmekar	√	√		√	2022



2.8	Pengembangan destinasi wisata makam Sunan Gunung Jati		√				2020
2.9	Pengembangan destinasi Gebang Mekar		√				2020

Selanjutnya, sebagai langkah konkret dalam mencapai tujuan pembangunan, maka sasaran, strategi dan arah kebijakan wajib dijabarkan ke dalam program-program yang langsung ditujukan untuk mencapai sasaran RPJMD sehingga tujuan pembangunan dapat tercapai dengan skenario penetapan target indikator dan target pagu indikatif yang realistis. Program-program tersebut dinamakan program prioritas yang langsung ditujukan untuk mencapai sasaran RPJMD atau sasaran kepala daerah. Secara rinci, penjelasan tersebut dijabarkan pada Tabel 6.4.



**Tabel 6.6 (Matriks Indikator Kinerja)
Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif
Kabupaten Cirebon**

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/impact/ outcome)	Satu an	Rumu s/ Formu la perhit ungan nnya	Kondisi Kine rja Awal RPJ MD tahun 201 8)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Peran gkat Daera h Pena ngun g Jawa b	
						Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024			Kaitan dengan Prrogra m unggula n Bupati
						Tar get	R p	Tar get	R p	Targ et	R p	Targ et	R p	Targ et	R p		
	MISI 1: Mewujudkan masyarakat yang menjunjung tinggi dan melestarikan nilai-nilai budaya, tradisi dan adat istiadat																
	Tujuan Melestarikan dan menumbuhkembangkan budaya Masyarakat	Budaya daerah yang dilestarikan	Prosentase		52%	56%	58%	60%	62%	64%						Disbudparpora	



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Rumus/ Formula perhitungan nya	Kondisi Kinerja Awal RPJMD tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Peran gkat Daerah Pena ngun g Jawa b	
						Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024			Kaitan dengan Prrogra m unggula n Bupati
						Tar get	R p	Tar get	R p	Targ et	R p	Targ et	R p	Targ et	R p		
	Sasaran 1.1 Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya masyarakat	Meningkatnya pelestarian karya seni dan budaya yang didaftarkan untuk memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	Juml ah kary a seni yang	Jumla h karya seni dan buday a yang didafta rkan untuk menda pat HKI ke Kemen kumh am		1		1		1		1		1		5	Disb udpar pora



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Rumus/ Formula perhitungan nya	Kondisi Kinerja Awal RPJMD tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Peran gkat Daera h Pena ngun g Jawa b	
						Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024			Kaitan dengan Prrogra m unggula n Bupati
						Tar get	R p	Tar get	R p	Targ et	R p	Targ et	R p	Targ et	R p		
	Program Pengembangan Nilai Budaya	Jumlah kelompok/komunitas kebudayaan yang rutin menggelar aktivitas budaya/seni minim	Jumlah kelompok/komunitas budaya	Jumlah kelompok/komunitas budaya/seni minim		175	180	185	190	195	200			Disbudparpora			



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Rumus/ Formula perhitungan nya	Kondisi Kinerja Awal RPJMD tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Peran gkat Daerah Pena ngun g Jawa b	
						Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024			Kaitan dengan Prrogra m unggula n Bupati
						Tar get	R p	Tar get	R p	Targ et	R p	Targ et	R p	Targ et	R p		
				al 5 kali setahu n													
	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	Juml ah caga r	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	2	2		2		2		2					
	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	Juml ah festiv al	Jumla h penyel enggar aan	4	8		8		8		8		8		Wisata berbasi s Budaya	Disbu dparp ora



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Rumus/ Formula perhitungan nya	Kondisi Kinerja Awal RPJMD tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Peran gkat Daerah Pena ngun g Jawa b	
						Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024			Kaitan dengan Prrogra m unggula n Bupati
						Tar get	R p	Tar get	R p	Targ et	R p	Targ et	R p	Targ et	R p		
				festival seni dan budaya yang digelar setiap tahun													
	Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya	Jumlah kerjasama/MoU dengan pihak lain dalam pengelolaan kekayaan budaya/situs	jumlah kerjasama /MoU	Jumlah kerjasama/ MoU dengan pihak	1	2	2	2	2	2			Wisata berbasis Budaya	Disbudparpora			



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Rumus/ Formula perhitungan nya	Kondisi Kinerja Awal RPJMD tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Peran gkat Daerah h Pena ngun g Jawa b	
						Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024			Kaitan dengan Prrogram unggulan Bupati
						Tar get	R p	Tar get	R p	Targ et	R p	Targ et	R p	Targ et	R p		
				lain dalam pengel olaan kekay aan buday a/situ s yang bukan milik Pemda													
	Sasaran 1.2 Berkembangnya sektor wisata berbasis budaya.	Jumlah wisatawan berbasis kebudayaan	jumlah	Jumlah wisata	996. 330	1.01 6.3 56	1.02 6.5 20	1.03 6.7 85		1.047 .153	1.05 7.6 24						



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Rumus/ Formula perhitungan nya	Kondisi Kinerja Awal RPJMD tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Peran gkat Daerah Pena ngun g Jawa b	
						Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024			Kaitan dengan Prrogra m unggula n Bupati
						Tar get	R p	Tar get	R p	Targ et	R p	Targ et	R p	Targ et	R p		
				wan berbas is kebud ayaan													
	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	jumlah destinasi wisata yang dikembangkan	jumlah	jumlah destin asi wisata baru yang dikem bangk an	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Wisata berbasi s Budaya		
	Program Pengembangan Kemitraan	Jumlah kerjasama pengembangan	jumlah	Jumlah	4	8	8	8	8	8	8	8	8	8	Wisata		



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Rumus/ Formula perhitungan nya	Kondisi Kinerja Awal RPJMD tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Peran gkat Daerah Pena ngun g Jawa b	
						Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024			Kaitan dengan Prrogra m unggula n Bupati
						Tar get	R p	Tar get	R p	Targ et	R p	Targ et	R p	Targ et	R p		
		kemitraan pariwisata dengan pelaku pariwisata	ah	h kerjas ama penge mbang an kemitr aan pariwi sata denga n pelaku pariwi sata	kerj asa ma										berbasi s Budaya		



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Rumus/ Formula perhitungannya	Kondisi Kinerja Awal RPJMD tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Peran gkat Daerah Pena ngun g Jawa b	
						Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024			Kaitan dengan Prrogra m unggula n Bupati
						Tar get	R p	Tar get	R p	Targ et	R p	Targ et	R p	Targ et	R p		
	MISI 2: Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan dan ekonomi																
	Tujuan Mewujudkan pembangunan manusia yang berkualitas dan sejahtera	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)			68,0 5	69, 15	69, 68	70, 21	70, 73	71, 24							
	Sasaran 2.1 Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	Rata rata Lama Sekolah	Tahu n	Kombi nasi antara partisi pasi sekola h, jenjan g pendid	6,62	6,7 2	6,7 7	6,8 2	6,8 7	6,9 2	Cirebo n Sejahte ra	Dina s Pendi dikan					



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Rumus/ Formula perhitungan nya	Kondisi Kinerja Awal RPJMD tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Peran Daerah Peningkat Jawab		
						Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024			Kaitan dengan Program unggulan Bupati	
						Tar get	R p	Tar get	R p	Targ et	R p	Targ et	R p	Targ et	R p			
				ikan yang sedang dijalan i, kelas yang didud uki dan pendid ikan yang														



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Rumus/ Formula perhitungan nya	Kondisi Kinerja Awal RPJMD tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Peran gkat Daerah Pena ngun g Jawa b	
						Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024			Kaitan dengan Prrogra m unggula n Bupati
						Tar get	R p	Tar get	R p	Targ et	R p	Targ et	R p	Targ et	R p		
				ditama tkan													
		Harapan Lama Sekolah	tahu n			12, 52		12, 67		12, 82		12, 97		13, 12	Cirebon Sejahtera	Dinas Pendi dikan	
	Program Pendidikan Non Formal	Angka melek aksara	pros en	LIT+ t = L+ t P+ t x		96 %		96, 58 %		97, 16 %		97, 74 %		98 %	Cirebon Sejahtera	Dinas Pendi dikan	
		Angka Lulusan Paket A Setara SD (%) Paket B Setara SMP (%) Paket C Setara SMA (%)	pros enta se			95 95 95		95 95 95		95 95 95		95 95 95		95 95 95	Cirebon Sejahtera	Dinas Pendi dikan	
	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun	Prosentase Capaian APK APK SD/MI (%) APK SMP/MTs (%)	pros enta se	APK t=E t h x		11 5 113		11 4 112		11 3 111		112 110 109		11 1 109	Cirebon Sejahtera	Dinas Pendi dikan	



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Rumus/ Formula perhitungan nya	Kondisi Kinerja Awal RPJMD tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Peran gkat Daerah Pena ngun g Jawa b	
						Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024			Kaitan dengan Prrogra m unggula n Bupati
						Tar get	R p	Tar get	R p	Targ et	R p	Targ et	R p	Targ et	R p		
				100 h P , tx h													
		Prosentase Capaian APM APM SD/MI (%) APM SMP/MTs (%)	pros enta se			100 98, 30		100 98, 59		100 98, 89		100 99, 19		100 99, 48	Cirebon Sejahte ra	Dinas Pendi dikan	
		Prosentase Angka Siswa yang Melanjutkan Sekolah SD ke SMP (%) SMP ke SMU (%)	pros enta se			100 80		100 83		100 85		100 87		100 90	Cirebon Sejahte ra	Dinas Pendi dikan	
		Prosentase Sarana dan Prasarana Sekolah Kondisi ruang kelas SD yang baik (%) Kondisi ruang kelas SMP yang baik (%)	pros enta se			70, 42		70, 84		71, 27		71, 70		72, 13	Cirebon Sejahte ra	Dinas Pendi dikan	



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Rumus/ Formula perhitungannya	Kondisi Kinerja Awal RPJMD tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Peningkatan Jawab	
						Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024			Kaitan dengan Program unggulan Bupati
						TARGET	RUP	TARGET	RUP	TARGET	RUP	TARGET	RUP	TARGET	RUP		
						80,5		81,0		81,50		82,0		82,4			
	Sasaran 2.2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	tahun	Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan		71,82		71,91		71,99		72,07		72,15		Cirebon Sejahtera	



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Rumus/ Formula perhitungannya	Kondisi Kinerja Awal RPJMD tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Peran gkat Daerah Pena ngun g Jawa b	
						Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024			Kaitan dengan Prrogra m unggula n Bupati
						Tar get	R p	Tar get	R p	Targ et	R p	Targ et	R p	Targ et	R p		
				han pola mortalit as menuru tumur													
	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Prosentase penanganan komplikasi kebidanan	pros enta se			81 %		82 %		83 %		84 %		85 %		Cirebon Sejahtera	Dina s Keseh atan
	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Prosentase neo komplikasi yang ditangani	pros enta se			10 0 %		100 %		100 %		100 %		100 %		Cirebon Sejahtera	
	Program Upaya kesehatan Masyarakat	Indeks Keluarga Sehat (IKS)	inde ks			0,2 1/ 21		0, 25/ 25		0, 30/ 30		0, 35/ 35		0, 40/ 40			



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Rumus/ Formula perhitungan nya	Kondisi Kinerja Awal RPJMD tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Peran gkat Daerah Pena ngun g Jawa b	
						Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024			Kaitan dengan Prrogra m unggula n Bupati
						Tar get	R p	Tar get	R p	Targ et	R p	Targ et	R p	Targ et	R p		
						%		%		%		%		%			
	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut	Persentase pelayanan kesehatan usia lanjut	pros enta se			10 0 %		100 %		100 %		100 %		100 %			
	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Rumah Tangga Ber PHBS	pros enta se			67 %		67 %		71 %		73 %		75 %			
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Persentase penanggulangan KLB penyakit dan keracunan makanan 1 x 24 jam	pros enta se			10 0 %		100 %		100 %		100 %		100 %			
		Persenta Imuniasasi Dasar lengkap	pros enta se			94 %		94 %		94, 5 %		95 %		95 %			
	Program Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM)	Persentase penderita hipertensi yang dilayani secara standar	pros enta se			10 0 %		100 %		100 %		100 %		100 %			



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Rumus/ Formula perhitungan nya	Kondisi Kinerja Awal RPJMD tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Peningkatan Jawab	
						Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024			Kaitan dengan Program unggulan Bupati
						TARGET	RUP	TARGET	RUP	TARGET	RUP	TARGET	RUP	TARGET	RUP		
		Persentase penderita DM yang dilayani secara standar	prosentase			100%		100%		100%		100%		100%			
	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) terakreditasi	prosentase			35%		40%		45%		50%		60%			
		Persentase rumah sakit terakreditasi	prosentase			100%		100%		100%		100%		100%			
		Persentase laboratorium kesehatan terakreditasi	prosentase			40%		50%		60%		70%		80%			
	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Prosentase rumah sehat	prosentase			85,98%		86,88%		87,78%		88,68%		89,58%			
			prosentase														



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Rumus/ Formula perhitungan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Peran gkat Daerah Pena ngun g Jawa b	
						Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024			Kaitan dengan Prrogra m unggula n Bupati
						Tar get	R p	Tar get	R p	Targ et	R p	Targ et	R p	Targ et	R p		
			enta se														
	Sasaran 2.3 Menurunnya angka kemiskinan	Persentase penduduk miskin di bawah garis kemiskinan	pros enta se		10,7	9,7 0	9,2 0	8,7 0		8,2	7,7						
	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS lainnya		pros enta se														
	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial		pros enta se														
	Program Pembinaan Anak Terlantar		pros enta se														
	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial		pros enta														



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Rumus/ Formula perhitungannya	Kondisi Kinerja Awal RPJMD tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Peran gkat Daerah h Pena ngun g Jawa b	
						Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024			Kaitan dengan Prrogram unggulan Bupati
						Tar get	R p	Tar get	R p	Targ et	R p	Targ et	R p	Targ et	R p		
			se														
	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Tercapainya UHC Kepesertaan JKN KIS				93 %		95 %		97 %		99 %		10 0 %			
	Sasaran 2.4 Menurunnya angka Pengangguran	Prosesntase Angka Penganggura terbuka			10,5 6	9,1 1		8,4 7		7,8 7		7,3 1		6,7 9			
	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Tercapainya Peningkatan Kesempatan Kerja															
	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tercapainya Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja															
	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Bertambahnya wilayah tujuan transmigrasi															
	Program Transmigrasi Lokal	Tercapainya Pembinaan transmigran lokal			100	100		100		100		100		100			



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Rumus/ Formula perhitungan nya	Kondisi Kinerja Awal RPJMD tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Peran gkat Daerah h Pena ngun g Jawa b	
						Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024			Kaitan dengan Prrogra m unggula n Bupati
						Tar get	R p	Tar get	R p	Targ et	R p	Targ et	R p	Targ et	R p		
	Program Pembinaan Lingkungan Sosial	Tercapainya Pembinaan di lingkungan hasil tembakau			100	100		100		100		100		100			
	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja															
	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	Tercapainya Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif															
	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Tercapainya Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah															
	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Tercapainya Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi															
	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Tercapainya Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah															



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Rumus/ Formula perhitungan nya	Kondisi Kinerja Awal RPJMD tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Peran gkat Daerah h Pena ngun g Jawa b	
						Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024			Kaitan dengan Prrogram unggulan Bupati
						Tar get	R p	Tar get	R p	Targ et	R p	Targ et	R p	Targ et	R p		
	MISI 3 Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan Nilai-Nilai Agama, Budi Pekerti, Santun dan Beretika																
	Tujuan 1 Meningkatkan Keshalehan social dan kerukunan antar dan intern umat beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Prosen ta se		75 %	78 %	81 %	84 %	87 %	90 %							
	Sasaran 3.1 Menurunnya kegiatan Asusila di Masyarakat	Angka penyakit masyarakat	lokasi	Berkur angny a jumla h lokasi rawan minu man	42 loka si	25	19	13	7	2							



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Rumus/ Formula perhitungan nya	Kondisi Kinerja Awal RPJMD tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Peran gkat Daerah h Pena ngun g Jawa b	
						Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024			Kaitan dengan Prrogram unggulan Bupati
						Tar get	R p	Tar get	R p	Targ et	R p	Targ et	R p	Targ et	R p		
				keras dan rawan prostit usi													
	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	Berkurangnya jumlah lokasi rawan minuman keras dan rawan prostitusi			20 titik rawan	8		4		4		4		4			
	Sasaran 2.6 Menurunnya Gesekan (Friksi) antar dan internal umat beragama	Angka Konflik Agama			0	4		3		2		2		1			
	Program Peningkatan Kualitas Kehidupan Keagamaan																



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Rumus/ Formula perhitungan nya	Kondisi Kinerja Awal RPJMD tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Peran gkat Daerah Pena ngun g Jawa b	
						Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024			Kaitan dengan Prrogra m unggula n Bupati
						Tar get	R p	Tar get	R p	Targ et	R p	Targ et	R p	Targ et	R p		
	Program Kemitraan pengembangan Wawasan Kebangsaan																
	Sasaran 2.7 Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan																
	Sasaran 2.8 Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan harapan (PPH)	point		87	88	88,	89,	89,	89,	90						
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	Penguatan cadangan pangan per 100 ton	prose	Jumlah cadangan pangan	10,7 6	26, 38	45, 58	66, 67	84, 72	104 ,1							



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Rumus/ Formula perhitungan nya	Kondisi Kinerja Awal RPJMD tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Peran gkat Daerah Pena ngun g Jawa b	
						Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024			Kaitan dengan Prrogra m unggula n Bupati
						Tar get	R p	Tar get	R p	Targ et	R p	Targ et	R p	Targ et	R p		
				kabup aten/1 440 ton X 100%													
		Daerah rawan pangan yang diintervensi	prose nta se	Jumla h desa rawan panga n yang diinter vensi/ total jumla h desa rawan	26,0 1	20		20		20		20		20			



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Rumus/ Formula perhitungan nya	Kondisi Kinerja Awal RPJMD tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Peran gkat Daerah Pena ngun g Jawa b	
						Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024			Kaitan dengan Prrogra m unggula n Bupati
						Tar get	R p	Tar get	R p	Targ et	R p	Targ et	R p	Targ et	R p		
				panga n X 100%													
	Sasaran 2.9 Meningkatnya penyediaan layanan infrastruktur wilayah	Indeks pembangunan infrastruktur wilayah yang mantap			77,3 6	80, 16	81, 61	83, 06	84, 51	85, 96							
	Program Pembangunan Jalan dan jembatan	Prosentase jaringan jalan kabupaten dalam kondisi baik	pros enta se	(Panja ng jalan kondis i baik/ Panjan g Jalan Kabup	45,8 1	49, 03	52, 26	55, 48	60, 32	63, 54							



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Rumus/ Formula perhitungan nya	Kondisi Kinerja Awal RPJMD tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Peran gkat Daerah h Pena ngun g Jawa b	
						Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024			Kaitan dengan Prrogram unggula n Bupati
						Tar get	R p	Tar get	R p	Targ et	R p	Targ et	R p	Targ et	R p		
				aten) x100%													
	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase	prose	(Panjan ng jalan yang memili ki trotoar dan draina se / Panjan g Jalan Kabup	5	5,3 5	5,5 6	5,7 7	5,9 8	6,1 4							



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Rumus/ Formula perhitungan nya	Kondisi Kinerja Awal RPJMD tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Peningkatan Jawab	
						Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024			Kaitan dengan Program unggulan Bupati
						Tar get	R p	Tar get	R p	Targ et	R p	Targ et	R p	Targ et	R p		
				aten) x100%													
	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan jembatan	Persentase jalan yang terjaga kemantapannya	Proses	(Panjang jalan yang terjaga keman tapan nya / Panjan g jalan Kabup aten) x100%	47,1 8	49, 67	49, 67	49, 67	49, 67	49, 67							
	Program Pengembangan dan	Persentase jaringan irigasi dalam	pros	(Panja	62,3	63,	64,	65,	66,	67,							



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Rumus/ Formula perhitungan nya	Kondisi Kinerja Awal RPJMD tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Peran gkat Daerah h Pena ngun g Jawa b	
						Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024			Kaitan dengan Prrogram unggulan Bupati
						Tar get	R p	Tar get	R p	Targ et	R p	Targ et	R p	Targ et	R p		
	Pengelolaan jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	kondisi baik	enta se	ng salura n irigasi kondis i baik/ Panjan g salura n irigasi Kabup aten) x100%	6	50		50		50		50		50			
	Program Pengendalian Banjir	Persentase berkurangnya luas daerah genangan akibat banjir	pros enta	(Luas daerah	1,1	0,9		0,8		0,7		0,6		0,5			



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Rumus/ Formula perhitungan nya	Kondisi Kinerja Awal RPJMD tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Peran gkat Daerah h Pena ngun g Jawa b	
						Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024			Kaitan dengan Prrogram unggulan Bupati
						Tar get	R p	Tar get	R p	Targ et	R p	Targ et	R p	Targ et	R p		
			se	banjir tahun berken aan / Luas daerah rawan banjir) x 100%													
	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Rasio ketersediaan sarana prasarana perhubungan (halte/terminal) yang layak fungsi	pro senta se	(Jumla h halte/t ermina l yang layak	45	50	55	60	65	70							



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Rumus/ Formula perhitungan nya	Kondisi Kinerja Awal RPJMD tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Peran gkat Daerah Pena ngun g Jawa b	
						Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024			Kaitan dengan Prrogra m unggula n Bupati
						Tar get	R p	Tar get	R p	Targ et	R p	Targ et	R p	Targ et	R p		
				fungsi / Jumla h kebut uhan(e ksistin g) halte/t ermina 1) x 100%													
	Sasaran 2.10 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	Poin		52,4 3	52, 59	52, 67	52, 76	52, 84	52, 92							



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Rumus/ Formula perhitungannya	Kondisi Kinerja Awal RPJMD tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Peran Daerah Peningkatan Jawab	
						Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024			Kaitan dengan Program unggulan Bupati
						TARGET	REalisasi	TARGET	REalisasi	TARGET	REalisasi	TARGET	REalisasi	TARGET	REalisasi		
	Program Pengendalian dan Pencemaran	Persentase hasil pemantauan kualitas air yang memenuhi baku mutu	Prosentase		48,06	48,54	48,78	49,02	49,26	49,50							
		Persentase hasil pemantauan kualitas udara yang memenuhi baku mutu	Prosentase		81,63	81,66	81,68	81,70	81,71	81,72							
	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Persentase SDA yang terkonservasi	Prosentase	SDA yang terkonservasi / Total SDA yang kritis	4,5	4,5	9	9	9	9							
	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Luasan RTH	ha		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5							



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Rumus/ Formula perhitungan nya	Kondisi Kinerja Awal RPJMD tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Peran gkat Daerah h Pena ngun g Jawa b		
						Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024			Kaitan dengan Prrogra m unggula n Bupati	
						Tar get	R p	Tar get	R p	Targ et	R p	Targ et	R p	Targ et	R p			
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase pengurangan sampah dan penanganan sampah	Prosen ta se		6,25	12, 5		22, 5		40		60		70				
	Sasaran 2.11 Meningkatnya kapasitas pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Prosen ta se		6,25													
		Indeks kemandirian fiskal daerah																